

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

Yuliana

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

Email: yuliana.tebo@gmail.com

Abstrak

Pertambangan batu bara di Provinsi Jambi merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun, aktivitas ini juga memunculkan berbagai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang kompleks bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keuntungan dan kerugian kegiatan pertambangan batu bara di Jambi dari perspektif keadilan sosial ekonomi dalam ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, data pemerintah, dan sumber-sumber akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sektor tambang memberikan manfaat ekonomi seperti peningkatan pendapatan daerah dan lapangan kerja, terdapat pula kerugian seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat, dan pengabaian hak-hak masyarakat lokal. Dalam pandangan ekonomi Islam, prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip syariah dalam kebijakan pertambangan guna menciptakan keadilan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertambangan Batu Bara; Ekonomi Islam; Keadilan Sosial; Jambi; Studi Kepustakaan

PENDAHULUAN

Pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor ekonomi strategis di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional maupun daerah. Di Provinsi Jambi, aktivitas pertambangan batu bara telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir dan menjadi penyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta lapangan kerja bagi masyarakat local (BPS Provinsi Jambi, 2022). Namun, pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Praktik pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, konflik lahan, serta ketimpangan distribusi ekonomi. Laporan WALHI Jambi (2021) menyebutkan bahwa banyak aktivitas

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

tambang di wilayah ini yang merusak hutan dan sumber mata air, bahkan merampas ruang hidup masyarakat adat dan petani. Selain itu, masyarakat seringkali tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang proporsional, sementara perusahaan tambang memperoleh keuntungan besar.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan tanggung jawab sosial. Islam menekankan bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah yang harus dikelola secara adil, bijak, dan berkelanjutan (Al-Qur'an, QS. Al-Hadid:7).

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya:

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi praktik pertambangan batu bara di Jambi melalui pendekatan ekonomi Islam agar dapat menghasilkan kebijakan dan tata kelola yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) guna mengidentifikasi serta menganalisis keuntungan dan kerugian tambang batu bara bagi masyarakat di Provinsi Jambi dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan mengkaji literatur akademik dan data empiris yang tersedia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan sosial Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian aktivitas pertambangan batu bara bagi masyarakat di Jambi, menganalisis praktik pertambangan dari sudut pandang ekonomi Islam, memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip keadilan sosial ekonomi Islam.

KAJIAN LITERATUR

A. Pertambangan Batu bara di Indonesia dan Provinsi Jambi

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagai penyumbang devisa, pendapatan daerah, serta penyedia energi domestic (ESDM, 2021: 12). Provinsi Jambi termasuk wilayah yang memiliki cadangan batu bara cukup besar, terutama di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tebo, dan Muaro Jambi. Aktivitas tambang di wilayah ini meningkat sejak awal 2000-an, seiring kebijakan otonomi daerah yang memberi ruang besar bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Menurut data BPS Provinsi Jambi (2022: 47), sektor pertambangan memberikan kontribusi sekitar 16,5% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi. Namun, laporan WALHI Jambi (2021: 9), menyebutkan bahwa ekspansi industri tambang juga memicu konflik agraria, kerusakan ekosistem, dan pencemaran sungai yang menjadi sumber air utama masyarakat.

Tambang batu bara di Jambi umumnya dikelola oleh perusahaan swasta nasional dan asing. Permasalahan klasik yang muncul di antaranya adalah praktik perizinan yang tidak transparan, lemahnya pengawasan terhadap reklamasi lahan, serta maraknya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat local (JATAM, 2020: 14). Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural antara pemilik modal dan masyarakat sekitar tambang.

Provinsi Jambi memiliki cadangan Batu bara yang melimpah, menjadikannya sebagai salah satu daerah penghasil Batu bara utama di Indonesia. Aktivitas pertambangan Batu bara telah berkembang pesat dengan luas areal tambang mencapai 10.332 hektar yang tersebar di tujuh kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Batang Hari 3.236 hektar, dan Sarolangun 2.536 hektar. Pertumbuhan sector ini membawa dampak signifikan terhadap kondisi social dan ekonomi masyarakat Provinsi Jambi. <https://jambi.antaranews.com/berita/605557/dampak-pertambangan-batu-bara-terhadap-kondisi-masyarakat-provinsi-jambi>.

B. Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan

Dampak ekonomi dari tambang batu bara meliputi beberapa aspek. Di satu sisi, tambang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi local (Haning & Wibowo, 2019: 231). Namun, pekerjaan di sektor tambang seringkali bersifat tidak tetap dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Selain itu, kehadiran tambang dapat menimbulkan inflasi lokal, kenaikan harga tanah, dan ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi (Sulistiyowati, 2020: 108).

Dari sisi sosial, pertambangan dapat menyebabkan: Konflik sosial: Terjadi akibat tumpang tindih lahan, penggusuran paksa, atau minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (WALHI, 2021: 11). Kerusakan lingkungan: Seperti degradasi hutan, pencemaran air sungai, dan gangguan terhadap habitat satwa. Penurunan kualitas hidup: Terkait dengan kesehatan akibat polusi udara dan air, serta perubahan struktur sosial komunitas.

Menurut Taufiqurrahman (2021: 66), dampak jangka panjang dari pertambangan lebih dominan bersifat negatif jika tidak diimbangi dengan perencanaan keberlanjutan dan kontrol sosial yang kuat. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan lintas generasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana. (2022), dibahas keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota serta Provinsi Jambi dengan tingkat intensitas konflik yang terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PDRB Provinsi Jambi dan PDRB dari 10 kabupaten/kota di wilayah tersebut dengan tingkat intensitas konflik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,01, serta adanya korelasi positif, yang mengindikasikan hubungan searah. Namun, hasil berbeda ditemukan di Kabupaten Merangin, di mana tidak teridentifikasi hubungan yang signifikan dan arah korelasinya justru negatif atau berlawanan.

C. Konsep Keadilan Sosial Ekonomi dalam Islam

Islam memandang keadilan ('adl) sebagai prinsip dasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga distribusi yang adil terhadap akses, manfaat, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 2000: 43).


Menurut Mannan (2002: 79), ekonomi Islam menekankan tiga elemen utama dalam keadilan sosial ekonomi:

1) Maslahah (kemaslahatan umum)

Segala aktivitas ekonomi harus membawa manfaat kolektif, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Maslahah mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2) Tawazun (keseimbangan)

Islam melarang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Dalam QS. Al-A'raf: 31, Allah melarang perbuatan yang melampaui batas (israf) dalam konsumsi maupun produksi.

﴿يَبْنَىِٔ اَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾


Artinya:

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

3) Amanah dan tanggung jawab

Kekayaan alam adalah titipan (amanah) dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab oleh manusia. QS. Al-Hadid: 7 menegaskan bahwa manusia adalah khalifah yang diberi kepercayaan untuk memakmurkan bumi.

Ekonomi Islam juga menolak penumpukan kekayaan oleh segelintir elit (QS. Al-Hasyr: 7), dan mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Dalam konteks pertambangan, prinsip ini menuntut agar manfaat tambang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh perusahaan dan elit daerah.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroiti isu pertambangan dari perspektif sosial dan lingkungan: Haning & Wibowo (2019) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan meneliti dampak ekonomi tambang terhadap pendapatan masyarakat di Kalimantan, namun belum mengkaji dari perspektif keadilan Islam.

Sulistiyowati (2020), dalam penelitiannya tentang konflik lahan tambang di Sumatera Selatan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan tambang. Yusriadi (2022), menelaah penerapan prinsip masalah dalam tata kelola hutan di Aceh dan menemukan bahwa ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif terhadap pembangunan berbasis sumber daya alam.

Namun, penelitian tentang pertambangan batu bara di Jambi yang ditinjau secara spesifik dari perspektif keadilan sosial ekonomi Islam masih tergolong minim. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut dan memberikan dasar argumentatif yang kuat untuk reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah: Sumber primer: Al-Qur'an, Hadis, dan literatur dasar ekonomi Islam seperti karya Mannan

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

(2002) *“Islamic Economics: Theory and Practice”* (Islamic Foundation), dan Chapra (2000) *“The Future of Economics: An Islamic Perspective”* (The Islamic Foundation).

Sumber sekunder: Buku-buku akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga lingkungan seperti WALHI dan JATAM, serta data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS Jambi, 2022) dan regulasi pemerintah terkait tambang. Teknik analisis data: Konten analisis (*content analysis*), yaitu menelaah makna, konteks, dan keterkaitan antar literatur yang ditinjau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keuntungan Ekonomi Pertambangan Batu Bara bagi Masyarakat Jambi

Pertambangan batu bara di Provinsi Jambi telah memberikan sejumlah manfaat ekonomi yang terlihat secara makro dan mikro. Secara makro, kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi mencapai 16,5% pada tahun 2021 (BPS Jambi, 2022: 47). Hal ini menunjukkan bahwa tambang menjadi salah satu pilar ekonomi penting bagi provinsi tersebut.

Di tingkat lokal, kehadiran tambang memicu pertumbuhan ekonomi sektor lain seperti transportasi, logistik, serta perdagangan kecil dan menengah. Selain itu, perusahaan tambang kerap menyerap tenaga kerja lokal meskipun umumnya terbatas pada pekerjaan kasar atau non-teknis. Menurut Haning dan Wibowo (2019:234), aktivitas tambang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang pertumbuhan usaha mikro di daerah sekitar lokasi tambang.

Perusahaan tambang juga kerap terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti pembangunan infrastruktur, beasiswa, dan pelatihan keterampilan. Namun, efektivitas CSR ini seringkali tidak merata dan tidak berkelanjutan (Sulistiyowati, 2020: 110). Banyak kegiatan CSR bersifat simbolik atau hanya untuk memenuhi syarat administratif dalam memperoleh izin.

Dalam perspektif ekonomi Islam, manfaat ekonomi semacam ini dapat dinilai positif apabila mengarah pada masalah 'ammah (kemaslahatan umum), bukan hanya memperkaya segelintir pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 267 bahwa harta yang baik harus disalurkan dari hasil yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kebermanfaatannya ekonomi dari tambang harus dipastikan inklusif, adil, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

B. Kerugian Sosial dan Ketimpangan Ekonomi Akibat Tambang

Meskipun memberikan manfaat ekonomi, dampak negatif tambang batu bara di Jambi tidak bisa diabaikan. Laporan WALHI Jambi (2021: 12), menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan menyebabkan rusaknya hutan lindung, pencemaran sungai Batanghari, serta berkurangnya sumber air bersih bagi warga. Selain itu, keberadaan tambang sering menimbulkan konflik agraria akibat tumpang tindih lahan antara perusahaan dan masyarakat adat atau petani lokal.

Ketimpangan ekonomi juga menjadi masalah serius. Data dari JATAM (2020: 15) menunjukkan bahwa mayoritas keuntungan tambang dinikmati oleh korporasi besar, sedangkan masyarakat lokal hanya menjadi buruh temporer tanpa kepastian pekerjaan. Dalam banyak kasus, pendapatan jangka pendek tidak mampu menutup kerugian jangka panjang akibat hilangnya mata pencaharian tradisional, seperti bertani dan berkebun.

Menurut Taufiqurrahman (2021:74), dampak sosial negatif ini mengindikasikan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam menolak sistem yang hanya menguntungkan elite ekonomi dan merugikan kelompok rentan. Prinsip ‘adl (keadilan) dalam Islam mewajibkan negara dan pelaku usaha untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

QS. Al-Hasyr: 7 menegaskan agar kekayaan tidak berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi harus sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan yang terjadi di Jambi akibat pertambangan menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan sosial ekonomi yang diajarkan oleh Islam.

C. Evaluasi Praktik Pertambangan di Jambi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki panduan moral dan struktural dalam mengelola sumber daya alam. Dalam prinsip amanah, manusia ditugaskan Allah sebagai khalifah untuk menjaga bumi (QS. Al-Hadid: 7). Maka dari itu, eksploitasi sumber daya seperti batu bara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merusak lingkungan maupun mengabaikan hak masyarakat.

Sayangnya, praktik pertambangan di Jambi cenderung jauh dari prinsip tersebut. Laporan WALHI (2021: 15) menunjukkan bahwa banyak perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi pasca-tambang, yang berdampak pada tanah gersang dan

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

kehilangan fungsi ekologis. Selain itu, ketidakjelasan izin tambang dan lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa amanah publik dalam pengelolaan sumber daya tidak dijalankan dengan baik.

Dalam maqashid *Al-Syari'ah* (tujuan utama syariat), pelestarian lingkungan termasuk dalam menjaga *nafs* (jiwa) dan *mal* (harta). Bila tambang menyebabkan pencemaran air yang mengancam kesehatan dan mata pencaharian, maka praktik tersebut bertentangan dengan *Maqashid Syariah* (Mannan, 2002: 82).

Selain itu, banyak peraturan tambang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Padahal Islam menekankan konsep musyawarah (QS. Asy-Syura: 38) sebagai bagian dari pengambilan keputusan publik. Ketidakhadiran masyarakat dalam proses perizinan atau penentuan lokasi tambang berkontribusi terhadap lahirnya konflik sosial yang seharusnya bisa dihindari.

D. Rekomendasi Penerapan Prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan analisis di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan pertambangan di Jambi:

1) Peningkatan keadilan distribusi manfaat.

Pemerintah daerah perlu merancang skema bagi hasil yang lebih adil antara perusahaan dan masyarakat lokal. Selain itu, penerapan zakat perusahaan tambang juga dapat menjadi mekanisme redistribusi kekayaan (Chapra, 2000: 52).

2) Reformasi kebijakan tambang berbasis Syariah.

Perlu dibentuk kebijakan pengelolaan tambang yang memasukkan prinsip masalah dan keberlanjutan lingkungan sebagai indikator utama keberhasilan, bukan sekadar profit.

3) Penguatan peran masyarakat.

Masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam proses pengambilan keputusan, melalui forum musyawarah, agar pengelolaan tambang sesuai kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

4) Pengawasan syariah dan lingkungan.

Dibutuhkan lembaga pengawas independen berbasis nilai Islam untuk mengawasi dampak sosial dan ekologis tambang, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip amanah dan keadilan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan tambang, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pertambangan batu bara di Provinsi Jambi memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur (BPS Jambi, 2022: 47). Di sisi lain, aktivitas ini juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Dari kajian kepustakaan ini, ditemukan bahwa praktik pertambangan yang berlaku saat ini di Jambi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan pada *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan umum), *tawazun* (keseimbangan), serta amanah (tanggung jawab) (Mannan, 2002: 79; Chapra, 2000: 43). Aktivitas ekonomi yang menghasilkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka syariah.

Tambang batu bara yang hanya menguntungkan pemilik modal tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam. QS. Al-Hasyr: 7 secara tegas memperingatkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit, dan QS. Al-Hadid: 7 menyebutkan bahwa manusia adalah pemegang amanah dalam memakmurkan bumi. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi Islam menjadi penting dalam menilai dan merancang ulang sistem tata kelola tambang agar berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian, penulis memberikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1) Untuk Pemerintah Daerah:

- a. Menyusun kebijakan pertambangan berbasis prinsip *maslahah* dan keberlanjutan lingkungan.

**Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian
Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam**

- b. Mengkaji ulang pemberian izin usaha tambang secara transparan dengan melibatkan masyarakat (QS. Asy-Syura: 38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Artinya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

- c. Mewajibkan perusahaan tambang menyisihkan sebagian keuntungan untuk program zakat, infak, dan pembangunan sosial secara konsisten (Chapra, 2000:52).
- 2) Untuk Perusahaan Tambang:
- a. Menerapkan tanggung jawab sosial yang bukan hanya formalitas, tetapi berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.
 - b. Melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-tambang dengan sungguh-sungguh, sesuai prinsip tawazun.
- 3) Untuk Masyarakat dan Akademisi:
- a. Masyarakat perlu memperkuat posisi tawar melalui pendidikan hukum, literasi ekonomi Islam, dan organisasi komunitas.
 - b. Akademisi dan peneliti di bidang ekonomi Islam perlu terus mengembangkan model-model tata kelola tambang berbasis syariah yang aplikatif.
- 4) Untuk Pembuat Kebijakan Nasional, Memasukkan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dalam Undang-Undang atau regulasi pertambangan nasional agar tercipta harmoni antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pertambangan Batu Bara Dan Keadilan Sosial Ekonomi di Jambi: Kajian Kepustakaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem pertambangan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara sosial dan spiritual, sebagaimana dikehendaki dalam sistem ekonomi Islam.

REFERENSI

- BPS Provinsi Jambi. (2022). *Provinsi Jambi dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Jambi.
- WALHI Jambi. (2021). *Laporan Tahunan Dampak Tambang di Jambi*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Al-Qur'an. Surah Al-Hadid: Ayat 7
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- ESDM. (2021). *Statistik Pertambangan dan Energi Nasional*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Haning, F., & Wibowo, A. (2019). "Dampak Ekonomi Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 229–239.
- JATAM. (2020). *Laporan Kritis Sektor Tambang Nasional*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.
- Mannan, M. A. (2002). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Leicester: Islamic Foundation.
- Sulistiyowati, T. (2020). "Konflik Lahan dan Ketimpangan Sosial Akibat Ekspansi Tambang". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 103–115.
- Taufiqurrahman, M (2021). *Ekonomi Islam dan Keadilan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusriadi. (2022). "Masalah dan Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam dan Lingkungan*, 4(1), 55–70.
- Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah: 267, QS. Al-Hasyr: 7, QS. Al-Hadid: 7, QS. Asy-Syura: 38
- Yuliana. (2022) *Analitis Disparitas Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jambi: Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Disertasi.
- <https://jambi.antaraneews.com/berita/605557/dampak-pertambangan-batu-bara-terhadap-kondisi-masyarakat-provinsi-jambi>.